

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2015). *Kamus Istilah Tata Ruang, Pemukiman, dan Permukiman Adat*.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Endarto, dkk. 2022. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri
- Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dahuri, R. 2006. *Hukum Adat: Antara Idealisme, Modernitas, dan Globalisasi*.
- Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Cetakan 2, edited by M. N. Hendrikus T. Gedeona. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Panduan Pengelolaan dan Pelestarian Kampung Budaya*.
- Effendi, Mansyur. (1994). *Dimensi Tahun Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

El Muhtaj, Majda. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai Dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2022*. Jakarta: Penerbit Jakarta.

Fakrulloh, Zudan Arif & Wismulyani, Endar. (2019). *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. Jakarta: PT. Cempaka Putih.

Fulthoni, Renata Arianingtyas, et.al. 2019. *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.

Fulthoni, Renata, Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing. 2009. *Buku Saku Untuk Kebangsaan. "Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan"*. The Indonesia Legal Resourch Center (ILRC).

J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.

Majda El Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2022*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Masyur Efendi, 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Unimal Press, 2019

Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pustaka Setia

Salim HS, 2005 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers

Soejono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers

Sudikno Mertokusumo Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1985. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*.

Wattimena, R. 2007. *Hukum Adat dan Hak Ulayat*.

Yuwono, U., & Sjahrir, B. 2007. *Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat*.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya

C. Jurnal

Jurnal Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong), Januari – Juni 2018 ISSN: 2252-5270 & E-ISSN: 2620-6056 Volume 7 Nomor 1

Jurnal The Implementation of Administrative Registration on Population Migration (Case of Surabaya City, East Java Province)

Muhammad Fadhil Muhammad Ilham. *Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalisasi pelayanan gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Volume. 1. Nomor. 3 (Januari 2019).

Uli E. S., Hananto W, “Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen di Surabaya,” Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 4, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017.

D. Internet/ Website

History Kampung Naga <http://perpustakaanbpnbjabar.kemdikbud.go.id/> dikunjungi pada 30 Juni 2024